Analisis Atas Penerapan Peraturan Perpajakan Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi dan Implikasinya Pada Akses Permodalan (Survei Pada UKM di Kecamatan Cibeunying Kaler)

Alifia Nur Fitriani
Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur 112
E-mail: alifia_oi@yahoo.co.id

Abstract

Many SMEs still difficult to get access to capital because of lack on accounting information. If they don't have books and recordskeeping, it will be difficult in calculating the turnover to calculate the tax.

The purpose of this study is to examine and analyze how much the application of tax regulations influence the quality of accounting information and how much the quality of accounting information in access to capital to SMEs in District Cibeunying Kaler Bandung.

The Research methods used descriptive and verificative method. The population in this study are 36 respondents, and the sample are 33 SMEs. To determine the relationship between tax regulations with the quality of accounting information and the relationship between the quality of accounting information with access to capital used a statistical test using PLS analysis used SmartPLSV.2.0.M3 program.

Statistical analysis showed moderate link and unidirectional relationship (positive) between tax regulations with the quality of accounting information and quality of accounting information with access to capital. The conclusions of the statistical analysis are a significant relationship between tax regulations with accounting information quality and quality of accounting information with access to capital.

Kerwords : Tax Regulations, Quality of Accounting Information, Access To Capital.

1. PENDAHULUAN

Seperti yang diketahui selain UKM masih terus berkembang mereka juga menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan perekonomian negara baik di Indonesia maupun diluar Indonesia. Dapat dilihat dalam PDB di Indonesia pada tahun 2009 sekitar 56,5%-nya berasal dari sektor UKM (Chandra Budi, 2013:3). Selain itu, dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2012 jumlah pelaku UKM mencapai 56.534.592 unit usaha dengan tenaga kerja mencapai 107.657.509 orang, sedangkan untuk Usaha Besar (UB) jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah UKM yaitu sebanyak 4.968 unit usaha dengan tenaga kerja berjumlah 3.150.645 orang (Sandingan Data Kemenkop, 2012). Hal tersebut menunjukan bahwa sektor UKM mendominasi sistem perekonomian di Indonesia dan mampu berkembang serta bersaing dengan Usaha Besar (UB) yang ada di Indonesia. Oleh karenanya UKM membutuhkan banyak dana dalam mengembangkan usahanya guna mampu bersaing.

Suatu bisnis atau usaha tidak akan berjalan ataupun didirikan tanpa adanya modal baik modal diri ataupun modal uang pendiri usaha tersebut. Hal yang dimaksud modal diri disini adalah Akal Pikiran dan 3K: Keberanian, Keyakinan, dan Ketekunan (Eddy Soeryanto Soegoto, 2009:130). Disamping modal diri tentunya semua usaha saat mendirikan dan mengembangkan usahanya membutuhkan modal uang. Modal itu sendiri bisa didapat dari modal pribadi pendiri atau pemilik ataupun dari pinjaman ke kreditor seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) merupakan usaha yang membutuhkan banyak modal atau didanai untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut dikarenakan keberadaan UKM yang

masih terus berkembang sehingga membutuhkan banyak modal dalam mengembangkan usahanya tersebut. Dengan kredit merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam pengembangan UKM tersebut serta pemberian kredit merupakan kepercayaan dari kreditur kepada debitur dalam menerima resiko dana masyarakat atau dan pihak ketiga yang diterima (Ardi Said dan N. Ika Widjaja,2007:30). Dan bagi UKM modal merupakan kebutuhan awal dalam menjalankan usahanya (Ardi Said dan N.Ika Widjaja,2007:13). Terdapat beberapa perbedaan cara penyaluran kredit dari bank umum kepada pelaku UKM yang dikemukakan oleh Ardi Said dan N.Ika Widjaja (2007:34) yaitu dari segmentasi pasar, kecenderungan pasar, kompetisi analisis kredit (mempengaruhi dalam keahlian dalam menetapkan segmen pasar yang akan dibiayai). Akses UKM terhadap permodalan akan lebih mudah jika mereka memiliki informasi akuntansi seperti yang diungkapkan oleh Ohachosim (2012) yang mengungkapkan bahwa semakin bagus atau berkualitas suatu informasi akuntansi yang dihasilkan oleh UKM maka akan semakin mengakses ke permodalan.

Namum sayangnya, UKM kerap kali kesulitan dalam hal akses permodalan (*bankable*) karena mereka tidak memiliki sistem administrasi dan memiliki informasi akuntansi yang jelas yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf CK.Arianto (2011:36) yaitu bahwa keterbatasan akses permodalan dapat terjadi dikarenakan terbatasnya informasi yang mereka sampaikan. Serupa, Direktur Utama Bank BCA, Jahja Setiaatmaja yang mengatakan fator-faktor yang mempengaruhi resiko kredit antara lain adalah pengalaman berbisnis yang dimulai dari modal sendiri, sehingga jika meminta pinjaman ke bank akan ditolak meski memiliki jaminan yang cukup. Hal senada disampaikan pula oleh anggota komisi VI DPR, Refrizal (2014) yang mengatakan bahwa UKM masih saja kesulitan dalam mencari akses permodalan (*bankable*). Jika UKM memperoleh pendanaan yang penuh bisa jadi mereka akan semakin berkembang hingga mampu mengekspor produk mereka ke luar negeri dan mengharumkan nama Indonesia. Amirullah dan Imam Hardjanto (2005:92) menambahkan bahwa masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetisi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan.

Seperti yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya UKM yang kesulitan memperoleh akses permodalan (*bankable*) tersebut karena mereka tidak cukup layak dibiayai oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki sistem administrasi, pembukuan dan informasi keuangan yang jelas sehingga informasi keuangan mereka tidak berkualitas. Padahal pihak bank membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh mereka. Selain itu, investor, kreditur atau pihak eksternal lainnnya menerima informasi dan laporan keuangan tersebut untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan memprediksi kinerjanya di masa depan (Azhar Susanto, 2004:15). Mereka tidak memiliki informasi keuangan karena tidak melakukan akuntansi yang benar seperti pembukuan dan pencatatan. Informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh informasi yang diperlukan oleh manajemen dan utamanya memiliki hubungan dengan data keuangan perusahaan (Tata Sutabri, 2004:1). Selain pihak bank, informasi keuangan yang dihasilkan juga dibutuhkan oleh UKM dalam mengembankan usahanya. Karena informasi yang dihasilkan tersebut menunjukan pelaku atau manajer UKM tentang usaha mereka dan perkembangannya. Menurut Nelson dan Onias (2011) dengan melaksanakan sistem akuntansi, maka dapat memberikan sumber informasi yang baik bagi pemilik maupum manajer UKM yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan mereka. Informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas dan baik apabila memiliki 3 kriteria yaitu

akurat (*accurate*), tepat pada waktunya (*timeliness*) dan relevan (*relevance*) (Kusrini dan Koniyo, Andri, 2007:8).

Namun, pada kenyataanya di lapangan UKM tidak memiliki laporan keuangan dan dokumentasi sehingga, secara infrastruktur dianggap tidak lengkap hal tersebut disampaikan oleh Analis PT ICRA Indonesia, Kreshna D Armand (2013). Selain itu, Direktur Komersial dan Bisnis Perbankan Mandiri Sunarso (2013) pun menambahkan UKM masih belum disiplin dalam menyusun laporan keuangannya sehingga laporan keuangan yang mereka hasilkan masih berantakan. Hal tersebut dikarenakan mereka masih belum mengelola keuangan mereka dengan baik seperti yang disampaikan oleh Pemimpin PNM Cabang Jambi Wire, Ariyayudanto (2014) yang mengatakan banyak UKM yang berhasil meraih penjualan yang memuaskan, namun gagal untuk naik kelas karena kurang pengetahuan dalam mengelola arus kasnya dan masih mencampur keuangan pribadi mereka dengan keuangan usaha mereka. Maryana Syamsiah (2013) menambahkan karena UKM tidak memiliki pembukuan, maka pertumbuhan usahanya pun menjadi tidak maksimal.

Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Varanya dan Tippawan (2011) alasan UKM mempersiapkan informasi keuangan adalah salah satunya untuk persiapan pajak. Meskipun tentunya sudah jelas selain hal tersebut, informasi keuangan sangat bermanfaat untuk memberikan informasi bagi para pengguna informasi tersebut. Pengguna utama informasi keuangan atau laporan keuangan tersebut adalah pemilik usaha, manajer, aparat pajak (fiskus) dan pemberi pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya (Page,1984). Karena UKM kesulitan dalam menghasilkan informasi keuangan yang lengkap, maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan agar pelaku UKM lebih mudah dalam menghitung pajaknya. Peraturan perpajakan yang dikeluarkan pada 1 Juli 2013 ini mengedepankan kemudahan bagi pelaku UKM dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) mereka. Dalam peraturan ini baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan dengan peredaran bruto minimal RP 4,8 Milyar setahun akan dikenakan pajak tunggal sebesar 1% setiap bulannya. Sistem pajak tersebut memang tidak mengharuskan Wajib Pajak memiliki pembukuan tetapi cukup dengan pencatatan mereka sudah mampu menghitung pajaknya. Meskipun begitu, tujuan dari sistem atau regime tersebut adalah untuk meningkatkan *compliance* dan mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan pencatatan dan pembukuan (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal,2013). Hal tersebut senada dengan pendapat Anandita Budi yang mengatakan bahwa penerapan peraturan perpajakan UKM adalah untuk mendorong pelaku UKM agar mulai untuk membuat pembukuan usaha secara tertib dengan membuat faktur penjualan dan kwitansi pengeluaran agar pajaknya sesuai dengan laba usaha mereka.

Meskipun pengenaan pajak ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, menurut Direktur Jendral (Ditjen) Pajak Fuad Rahmany (2014) masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Selain itu, pajak UKM ini dianggap akan menggerus laba usaha dan akan memberatkan para pelaku UKM seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan yang menolak pengenaan pajak pada sektor UKM ini, karena akan memberatkan para pelaku usaha UKM. Selain itu, menurut Anandita Budi Suryana hal tersebut karena pelaku UKM belum mengerti kewajiban dan tatacara pembayaran pajak. Selanjutnya, menurut Deny Faizal Mirza (2013) masih terdapat pelaku UKM yang tidak memiliki NPWP. Menurut Purnomo, penyedia jasa marketing online untuk UKM dan pemilik portal berita news.manycome.com yang menyampaikan bahwa dengan pelaku UKM disiplin membayar pajak, maka mereka akan berusaha untuk mengelola keuangan mereka dengan baik sehingga mempermudah mereka dalam memperoleh akses kredit ke bank. Namun karena UKM jarang

ada yang memililliki laporan keuangan, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman modal. Padahal seluruh asset atau perkembangan usaha dapat dilihat dari laporan keuangan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Paguyuban UKM Amangtiwi Malang, Dwi Septariena (2013) yang mengatakan bahwa banyak UKM yang tidak memiliki barang yang bisa dijaminkan untuk mendapat modal dari bank. Sama halnya dengan Jahja Setiaatmadja (2013), menurut Direktur Utama Bank BCA mengatakan bahwa selain faktor pengalaman, pemohon juga perlu memiliki jaminan aset. Direktur Komersial dan Bisnis Perbankan Mandiri Sunarso (2013) menambahkan selama ini pelaku UKM kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan masih berantakan. Jika hal ini dibiarkan saja tentunya UKM akan kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal dan sulit untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, jika UKM masih belum melakukan akuntansi maka mereka akan terus dikenakan pajak melalui omzet usaha mereka bukan dari laba usaha mereka yang sebernarnya. Sunarso menyarankan UKM untuk mencoba menyusun laporan keuangan yang baik agar pajak yang dikenakan sesuai profit. Maka, dengan membayar pajak, memeproleh NPWP, dan melakukan akuntansi yang baik UKM akan memperoleh pinjaman modal dan mampu mengembangkkan usahanya.

Karena permasalahan pengelolaan keuangan dan kualitas dari informasi akuntansi tersebut maka UKM kesulitan dalam hal akses permodalan (*bankable*). Dengan adanya peraturan perpajakan tersebut diharapkan UKM mau membayar pajak dan menjadi lebih tertib lagi dalam mengadministrasikan, mengelola keuangan hingga menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, akurat, lengkap, reabilitas dan kompabilitas. Selain itu, dengan UKM menghasilkan laporan keuangan yang legkap dan berkualitas pula UKM mampu mendapatkan akses permodalan (*bankable*) dan pajak yang dikenakan pun akan sesuai dengan profit yang mereka miliki. Seperti yang disarankan oleh Sunarso agar UKM mencoba menyusun laporan keuangan yang baik agar pajak yang dikenakan sesuai profit. Maka, dengan membayar pajak, memeproleh NPWP, dan melakukan akuntansi yang benar dan menghasilakn informasi akuntansi yang berkualitas UKM akan memperoleh pinjaman modal dan mampu mengembangkkan usahanya.

Rumusan Masalah

1) Seberapa besar penerapan peraturan perpajakan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.
2) Seberapa besar kualitas informasi akuntansi mempengaruhi akses pemodalan.

Tujuan Penelitian

1) Untuk menguji dan menganalisa seberapa besar penerapan peraturan perpajakan berpengaruh pada kualitas informasi akuntansi.
2) Untuk menguji dan menganalisa seberapa besar kualitas informasi akuntansi pada akses permodalan.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah melalui model kerangka pemikiran yang peneliti ajukan dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah pada akses permodalan UKM. Dan berdasarkan fenomena-fenomena yang telah terjadi tentang penerapan perpajakan, kualitas informasi akuntansi dan akses permodalan diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini mampu menjadi salah solusi dan pemecah masalah dari fenomena tersebut.

Sedangkan kegunaan akademis dalam peneltian ini adalah peneliti melakukan pengembangan ilmu dengan cara memverifikasi apakah konsep mengenai pengaruh penerapan peraturan perpajakan terhadap kualitas informasi akuntansi UKM dan implikasinya pada akses permodalan UKM masih relevan. Verifikasi dilakukan dengan cara pembuktian secara empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji diharapkan mampu membuktikan bahwa penerapan peraturan perpajakan berpengaruh pada kualitas informasi dan memiliki implikasi pada akses permodalan. Hasil dari penelitian ini merupakan pengembangan ilmu dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menunjukan bahwa teori-teori yang digunakan sebagai konsep dalam penelitian ini merupakan bentuk pengetahuan bagi penulis.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka
Peraturan Perpajakan

Menurut Erly Suandy (2010:13) peraturan perpajakan atau hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemunggut pajak dan rakyatnya sebagai pembayar pajak.

Dan menurut Santoso Brotoharjo dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:76) peraturan perpajakan atau hukum pajak yaitu:

> keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara , sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

Indikator dalam mengukur penerapan peraturan perpajakan adalah:

1) Siapa yang menjadi Wajib Pajak dan apa kewajibannya
2) Objek-objek yang dikenakan pajak
3) Timbul dan hapusnya hutang pajak
4) Cara penagihan pajak
5) Cara mengajukan keberatan

Kualitas Informasi Akuntansi

Dasaratha V. Rama dan Frederick L. Jones (2008:6) menjelaskan informasi akuntansi merupakan bagian utama dari perangkat informasi yang diperlukan oeh semua pengguna, para akuntan berada di posisi yang baik untuk meningkatkan nilai pelayanan mereka dengan memperluas fokus mereka dan mempertimbangkan keseluruhan proses bisnis. Selain itu, Menurut James A. O'Brien dan George M. Marakas (1996: 365) kualitas informasi akuntansi adalah informasi dengan karakteristik /atribut yang membuat informasi akuntansi berharga bagi pengguna.

Indikator untuk kualitas informasi adalah :

1) Akurat
2) Relevan
3) Tepat waktu
4) Lengkap

Akses Permodalan

Liliana Rojas-Suarez (2010:5) mendefinisikan akses permodalan secara luas sebagai bagian dari perusahaan yang mau menggunakan jasa keuangan yang jika mereka memilih mendapatkannya maka akan memiliki efek besar pada kesejahteraan dan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Akses permodalan menurut Claessens (2006) adalah ketersediaan pasokan jasa keuangan kualitas wajar dengan biaya terjangkau, di mana kualitas yang wajar dan biaya yang wajar harus didefinisikan relatif terhadap beberapa standar objektif, dengan biaya yang mencerminkan semua berupa uang dan non-uang.

Indikator untuk akses permodalan adalah:

1) Mampu membayar kembali
2) Karakter yang baik
3) Kemampuan manajemen
4) Jaminan
5) Kontribusi modal sendiri

Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis
Peraturan Perpajakan dan Kualitas Informasi Akuntansi

Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK dan memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu informasi harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan. Dan peraturan perpajakan menjadi prioritas utama untuk dipatuhi (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2010:10). Dengan tidak adanya pedoman-pedoman yang khusus untuk menentukan informasi apa yang relevan bagi masing-masing perusahaan, beberapa standard umum diperlukan mengenai pemilihan informasi yang akan disajikan, berapa detailnya informasi yang harus disajikan dan pemilihan konsep dan prosedur pengukuran yang relevan untuk pemakai tertentu dalam membuat prediksi dan keputusan (Theodorus M. Tuanakota, 1999:94).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alessandra *et. al* (2014) mengungkapkan bahwa dari hasil pencarian menunjukkan efek mengikat antara praktik dan standar akuntansi pajak terhadap kualitas informasi akuntansi yang dilaporkan kepada pengguna eksternal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan agen ekonomi. Shenaz Badloe (2011) menambahkan bahwa sistem hukum dan politik mempengaruhi kualitas akuntansi melalui sistem pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa peraturan perpajakan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.

Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi dan Akses Permodalan

Umumnya laporan keuangan yang dihasilkan terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan-laporan ini merupakan ringkasan dari kedaaan perusahaan yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan seperti langganan, pemegang saham, kreditur, bank, kantor pajak, dan lain-lain (Tata Sutabri, 2004:1). Akuntansi juga dapat dipandang sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan oleh para manager, pemilik, kreditor dan agensi pemerintah. Akuntansi tentunya akan berfungsi sebagai penyedia informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor juga kreditor dalam pengambilan keputusan dan pemberian kredit (Arfan Ikhsan, 2009:1).

Dari hasil penelitian Ohachosim *et al.* (2012) bahwa akses UKM terhadap pendapatan/keuangan memiliki hubungan yang positif dengan praktik akuntansi yang dilakukan UKM yaitu semakin tinggi kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh UKM semakin mengakses UKM untuk mendapatkan keuangan. Sependapat dengan Ohachosim, menurut Das (2007) dalam Ashok Thampy (2010) mengungkapkan bahwa meningkatkan kulitas informasi keuangan adalah penting sebagai persyaratan untuk meningkatkan aliran dana UKM, seperti kualitas informasi juga mempengaruhi keuangan pinjaman. Selain itu, Naruanard dan Kotey (2006) mengungkpakan bahwa kualitas informasi akuntansi/keuangan memiliki efek positif secara signifikan terhadap perkembangan dan dalam persepsi manajer-pemilik pada kemampuan mereka pada akses permodalan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dpat dikatakan bahwa kualitas informasi akuntansi dipengaruhi oleh akses permodalan.

Hipotesis

1) Penerapan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.
2) Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Akses Permodalan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2013:203) adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti utuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif murni (survey) dan verifikatif.

Metode verifikatif yang dilakukan untuk memnguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu *Structural Equation Mode*l (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan program *SmartPLS V.2.0 M3*. Penulis menggunakan model ini dikarenakan PLS mampu menggambarkan variabel laten (tak teurkur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikatornya dan menganalisis kekeliruan pengukurannya.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, karena dalam penelitian ini data bersumber atau diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti. Data primer. Dalam pengumpulan data menggunakan data primer tersebut, penulis menyebarkan kuesioner atau angket kepada responden mengenai variabel yang akan diteliti pada UKM di Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung. Unit analisis dalam penelitian ini adalah UKM pada Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung. Unit obervasi dalam penelitian ini adalah 36 UKM yang

terdaftar di Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung. Adapun Rumus yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 33 pelaku UKM pada Kecamatan Cibeunying Kaler.

Analisis deskriptif menggunakan persentase skor aktual. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS V.2.0.M3.* Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis Desktiptif tanggapan responden pada variabel peraturan perpajakan pada UKM di Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung diukur dengan lima indikator, yaitu siapa yang menjadi wajib pajak dan apa kewajibannya, objek-objek yang dikenakan pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak, cara penagihan pajak, dan cara mengajukan keberatan. Hasil tanggapan responden menunjukkkan bahwa penerapan peraturan perpajakan pada UKM kecamatan Cibeunying Kaler Bandung berada dalam kategori kurang baik, artinya penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penerapan peraturan belum diterapkan dengan baik oleh Pelaku UKM di Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung.

Tanggapan responden pada variabel kualitas infomrasi akuntansi pada UKM Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung diukur dengan empat indikator, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Hasil tanggapan responden menunjukkkan bahwa kualitas informasi akuntansi pada UKM di Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung berada dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa kualitas informasi akuntansi UKM di Kecamtan Cibeunying Kaler Bandung sudah diterapkan dengan cukup baik.

Tanggapan responden pada variabel akses permodalan diukur dengan lima indikator, yaitu mampu membayar kembali, karakter yang baik, kemampuan manajemen, jaminan, kontribusi modal sendiri. Hasil tanggapan responden menunjukkkan bahwa akses permodalan pada UKM di Kecamatan Cibeunying kaler Bandung dalam kategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa akses permodalan pada Pelaku UKM di Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung dapat dikatakan cukup baik.

Hasil Analisis Verifikatif

1) hasil pengujian Kecocokan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Kelima indikator peraturan perpajakan sudah valid dan reliabel dan mampu merefleksikan variabel latent peraturan perpajakan. Hasil *loading factor* menunjukkan bahwa yang paling kuat dalam merefleksikan variabel adalah indikator siapa yang menjadi wajib pajak dan apa kewajibannya sedangkan yang paling lemah adalah indikator cara penagihan pajak.

Keempat indikator kualitas informasi akuntansi sudah valid dan reliabel dan mamapu merefleksikan variabel latent kualitas informasi akuntansi. Hasil *loading factor* menunjukkan

bahwa yang paling kuat dalam merefleksikan variabel adalah indikator tepat waktu sedangkan yang paling lemah adalah indikator akurat.

Kelima indikator akses permodalan sudah valid dan reliabel dan mamapu merefleksikan variabel latent akses permodalan. Hasil *loading factor* menunjukkan bahwa yang paling kuat dalam merefleksikan variabel adalah indikator karakter yang baik sedangkan yang paling lemah adalah indikator kontribusi modal sendiri.

2) hasil Pengujian Kecocokan Model Struktural (*Inner Model*)

Nilai koefisien korelasi peraturan perpajakan terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 0,562 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi sedang atau cukup dan hubungan positif. Artinya penerapan peraturan perpajakani yang baik akan diikuti dengan kualitas informasi akuntansi yang baik pula. Nilai koefisien determinasi (R^2) peraturan perpajakan yang mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 31,6% atau 0,316 dan termasuk ke dalam kriteria determinasi sedang atau cukup, sisanya sebesar 68,4% merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti.

Nilai koefisien korelasi kualitas informasi akuntansi terhadap akses permodalan sebesar 0,535 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi sedang atau cukup dan hubungan positif. Artinya kualitas informasi akuntansi yang baik akan diikuti dengan akses permodalan yang baik pula. Nilai koefisien determinasi (R^2) peraturan perpajakan yang mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 28,6% atau 0,286 dan termasuk ke dalam kriteria determinasi sedang atau cukup, sisanya sebesar 71,4% merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis pertama secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_0: Peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.

H_1: Peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hasil menunjukkan bahwa nilai t-hitung korelasi peraturan perpajakan terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 9,454 lebih besar dari t-tabel 1,645. Karena nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan t-tabel, maka diputuskan untuk menolak H0, sehingga H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kaulaitas informasi akuntansi pada UKM di Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung.

Untuk menguji hipotesis kedua secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_0: Kualitas informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap akses pemodalan.

H_1: Kualitas informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap akses pemodalan.

Hasil menunjukkan bahwa nilai t-hitung korelasi peraturan perpajakan terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 7,026 lebih besar dari t-tabel 1,645. Karena nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan t-tabel, maka diputuskan untuk menolak H0, sehingga H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap akses permodalani pada UKM di Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung.

Pembahasan

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi dapat dijelaskan oleh Penerapan Peraturan Perpajakan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,562 sehingga termasuk ke dalam kriteria sedang dengan arah positif. Jadi, terdapat hubungan yang cukup baik atau sedang antara peraturan perpajakan dengan kualitas informasi akuntansi. hubungan tersebut berlaku untuk 33 orang tersebut. Arah hubungan sedang menunjukkan bahwa Penerapan Pertauran Perpajakan yang baik akan diikuti dengan tingkat Kualitas Informasi Akuntansi yang baik pula dan kontribusi Penerapan Peraturan Perpajakan sebesar 31,6% terhadap Kualitas Informasi Akuntansi. Sisanya sebesar 68,4% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Penerapan Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, dimana penerapan peraturan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa adanya perbedaan antara akuntansi yang disusun berdasarkan SAK dan peraturan perpajakan, namun peraturan perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2010:10). Dengan kata lain bahwa dengan peraturan perpajakan maka informasi akuntansi akan berkualitas. Hal senada dinyatakan oleh Theodorus M. Tuanakota (1999:94) yang mengatakan bahwa dengan adanya pedoman-pedoman dan starndar akan mengahsilkan informasi yang relevan. Selanjutnya Dasaratha V. Rama (2008:7) menjelaskan bahwa standar dan peraturan dibuat sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para ivestor, kreditor, badan-badan pemrintahan dan lain-lain.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alessandra et al (2014) yang mengungkapkan bahwa terdapat efek mengikat antara praktik dan standar akuntansi pajak terhadap kualitas informasi akuntansi. Serta hasil penelitian Shenaz Badloe (2011) yang mengatakan bahwa sistem hukum dan politik mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. faktor-faktor lain sebesar 94,7% yang tidak diteliti antara lain Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan menghitung jumlah pajak terutang dengan benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa penerapan peraturan perpajakan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.

Kualitas Informasi Akuntansi dan Akses Permodalan

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Akses Pemodalan dapat diterangkan atau dijelaskan oleh Kualitas Informasi Akuntansi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,535, sehingga termasuk ke dalam kriteria sedang dengan arah positif . Jadi, terdapat hubungan yang cukup baik atau sedang antara kualitas informasi akuntansi dengan akses permodalan. hubungan tersebut berlaku untuk 33 orang tersebut Arah hubungan positif menunjukkan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi yang tinggi akan diikuti dengan Akses Pemodalan yang tinggi pula dan kontribusi Kualitas Informasi Akuntansi sebesar 28,6% terhadap Akses Pemodalan. Sisanya sebesar 71,4% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Kualitas Infromasi Akuntansi berpengaruh terhadap Akses Permodalan, dimana Kualitas Informasi Akuntansi yang tinggi akan meningkatkan Akses Permodalan bagi Pelaku UKM di Kecamatan Cibeuning Kaler. Hasil

penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan ringkasan dari keadaan perusahaan yang digunakan oleh investor dan keditur dalam mengambil keputusan dan pemberian kredit (Tata Sutabri; 2004:1, Arfan Ikhsan; 2009:1, Yusuf CK Arianto; 2011:36) serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi memilki hubungan positif secara signifikan terhadap Akses Pemodalan dan semakin berkualitas suatu informasi makan akses permodalan akan semakin mudah (Ohachosim et al; 2012, Das; 2007, Ashok Tampy: 2010, Kotey; 2006). Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 71,4% antara lain Lending Terms, Cost of Money, Loan Size, Loan Period (Ashok Tampy:2010).

Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kualitas informasi akuntansi mempengaruhi akses permodalan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Penerapan Peraturan Perpajakan Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi dan Implikasinya Pada Akses Permodalan (survey pada Wajib Pajak UKM pada Kecamatan Cibeunying Kaler), maka pada bagian akhir dari penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan perpajakan memberikaan pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Adapun fenomena yang terdapat pada kualitas informasi akuntansi masih rendah karena penerapan peraturan perpajakan yang belum baik sehingga informasi akuntansi belum berkualitas yang ditandai dengan masih terdaoat Pelaku UKM yang belum memahami cara membayar pajak, belum memhamai cara menghitung pajak, sebagian belum memiliki NPWP, belum memahami cara DJP menagih pajak, belum memahami cara mengajukkan keberatan.
2. Kualitas sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh terhadap akses pemodalan UKM. Adapun fenomena yang terjadi pada akses permodalan yang masih sulit karena informasi akuntansi yang dihasilkan masih belum berkualitas yang ditandai dengan Pelaku UKM masih mencampur aduk keuangan pribadi dan usaha serta belum tertib administrasi keuangannya, belum memiliki laporan keuangan sehingga sulit mendapat pinjaman, laporan keuangan belum disampaikan tepat waktu,dan laporan keuangan belum disajikan secara lengkap.

Saran

Saran Opersaional

1) Untuk meningkatkan atau memperbaiki peraturan perpajakan yang masih lemah, maka peneliti memberikan saran Agar UKM dapat memahami kewajibannya, maka DJP perlu memaksa, memberikan sanksi, dan melakukan penagihan paksa kepada Wajib Pajak agar jera dan mau membayar pajak. Selain itu, perlu sosialisasi kepada mereka mengenai objek-objek pajak yang dikenakan kepada Pelaku UKM. Agar Pelaku UKM memahami timbul dan hapusnya hutang pajak perlu adanya sebuah peraturan, memberi sosialisasi, serta memberi sanksi kepada mereka agar mereka memahami timbul dan hapusnya hutang pajak serta memiliki NPWP. Serta, perlu adanya sosialisasi dan memberikan penyuluhan mengenai

penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP dan mengadakan penyuluhan agar memahami cara mengajukan surat keberatan kepada DJP.

2) Untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas informasi akuntansi perpajakan yang masih lemah pada UKM di Cibeunying Kaler maka peneliti memberikan saran operasional adalah perlu membuat peraturan agar Pelaku UKM membuat laporan keuangan serta memberikan sanksi apabila masih tidak membuat laporan keuangan yang akurat, penyuluhan dan pendidikan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang relevan, sehingga laporan tersebut dapat membantu Pelaku UKM dalam mengambil keputusan usahanya serta pentingnya akuntansi dan laporan keuangan demi keberlangsungan usaha mereka serta memberikan sanksi. Dan memberikan pendidikan dan sosialisasi bagi Pelaku UKM tentang pentingnya kelengkapan laporan keuangan, selain itu dapat pula diberikan sanksi.

Saran Akademis

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan untuk Peraturan Perpajakan seperti Wajib Pajak berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan dan menghitung jumlah pajak terhutang. Indikator yang tidak digunakan untuk Kualitas Informasi Akuntansi yaitu reabilitas dan komparabilitasdan. Dan untuk indikator Akses Pemodalan lending terms, loan size, loan period. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu SEM PLS, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Ardi Said dan N. Ika Widjaja. 2007. *Akses Keuangan Umkm Buku Panduan Utuk Membangun Akses Pembiayaan Bagi Usaha Menengah Kecil Dan Mikro Dalam Konteks Pembangunan Daerah*. Jakarta: Konrad-adenauer-stiftung e.v, gtz-red.

Amirullah, dan Imam Hardjanto, 2005. *Pengantar Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anandita Budi Suryana. 2012. *Pembinaan UKM dan Investasi Untuk Pajak*. . Melalui <www.pajak.go.id>

Ariyayudanto. 2014. *Tips Kelola Laporan Keuangan Usaha Mikro dan Kecil*. VIVA News. <http://www.bisnis.news.viva.co.id>.

Arfan Ikhsan. 2009. *Pengantar Praktisi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Azhar Susanto. 2004.*Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung: Lingga Jaya.

Badan Kebijakan Fiskal. 2013. *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Artikel Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal.

Badloe, Shenaz. 2011. *The Quality of Accounting Information: A Case of Netherlands*. E-journal on-line melalui <http://omicsonline.com>

Chandra, Budi. 2013. *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak Itu Sangat Mudah*. Jakarta: Gramedia.

Claessens, S. 2006. *Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives*. World Bank Research Observer 21(2).

Deny Faisal Mirza. 2013. *70% UKM di Sumut Tak Punya NPWP*. Media Bisnis Daily. Melalui <http://www.medanbisnisdaily.com/>

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung. *Sentra Industri Bandung*. Melalui<http://sentraindustribandung.com>

Dwi Septariena. 2013. *Kesulitan Modal, 1.000 UMKM Malang Gulung Tikar*. Tempo. Melalui <http://www.tempo.co>

Eddy SoeryantoSoegoto. 2009. *Entrephreneurship : Menjadi Pebisnis Ulung*. Jakarta:Elex Media Komputindo.

Erly Suandy. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Fuad Rachmany. 2014. *Hanya 60 Juta Orang Yang Bayar Pajak*. okezone. Melalui<http://economy.okezone.com>

Ikem, Ohachosim Celestine dkk. 2012. *Financial Challenges Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Nigeria: The Relevance Of Accounting Information*. Review of Public Administration & Management Vo. 1 No. 2. E-journal on-line <http://omicsonline.com>

Jahja Setiaatmadja. 2013. *UKM Punya NPWP, Tak Otomatis Dianggap Bankable. Bisnis Tempo*. Melalui <http://bisnis.tempo.co/>

Kementerian Koperasi. 2012. Sandingan Data Kemekop.

Kreshna D. Ahmad. 2013. *Tahun 2013, Perbankan 'Dihantui' Kredit Macet UMKM. Detik Finance*. Melalui <http://www.finance.detik.com>

Kusrini dan Andri Koniyo. 2007. *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maryana Syamsiah. 2013. *Masalah Pembukuan, Usaha Mikro Terancam Berantakan*. SWA. melalui <http://www.swa.co.id>

Maseko, Nelson and Manyani, Onias. 2011. *Accounting Practices of SMEs in Zimbabwe: An Investigative Study of Record Keeping for Performance Measurement (A Case Study of Bindura)*. Journal of Accounting and Taxation Vol. 3(8), pp. 171-181. Bindura University of Science Education, Zimbabwe. E-Journal on-line melalui <http://www.academicjournals.org/JAT>

Michell Suharli. 2006. *Akuntansi Untuk Bisnis Dan Jasa Dagang*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Naruanard dan Kotey, Bernice. *The Effect of Demand-Side Issue in Accessing External Funds on Performance of SMEs in Thailand*. E-journal on-line <http://www.eujournal.org>

Niko Budianto. 2013. *UKM Masih Punya Banyak Masalah Internal*. Ekonomi Okezone. Melalui <http://economy.okezone.com/>

O'Brien, James A dan Goerge M. Marakus. 1996. *Management Information System. 13th Edition*. McGraw-Hill Intemasional, United States of America.

Page MJ (1984). *Corporate financial reporting and the smallindependent company*. J. Acc. Bus. Res., 15(3): 271-280.

Safari Azis. 2013. *Kadin: UKM Indonesia Masih Kesulitan Permodalan. Berita Satu*. Melalui <http://www.beritasatu.com>

Sompong dan Amarit, Khajit Konthong. 2010. *Accounting information quality, CRM effectiveness, and marketing performance: an empirical evidence from e-commerce companies in Thailand*. E-journal on-line <http://www.freepatentsonline.com>

Rama, Dasaratha V. dan Jones, Frederick I. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Refrizal. 2014. *Politisi PKS: Masuk Surga Lebih Gampang Ketimbang Cari Pinjaman Bank*. JPNN. Melalui <http://www.jpnn.com>

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan: Konsep & Aspek Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suarez, Liliana Rojas. 2010. A*ccess to Financial services in emerging powers:Facts, Obstacle and Policy Implications*. E-journal on-line <http://www.oecd.org/>

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Sunarso. 2013. *UKM Bikin Laporan Keuangan Dulu Jika Tidak Mau Ditarik Pajak 1% Dari Omset*. Detik Finance. Melalui <http://www.finance.detik.com>

Tata Sutabri. 2004. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

Tanwongsval, Varanya dan Tippawan Pinmvanichkul. 2011. *Accounting Information Requirement and Reporting Practices of Thai SMES*. E-journal on-line <http://www.gmi.kmutt.ac.th>

Thampy, Ashok. 2010. *Financing of SME firms in India Interview with Ranjana Kumar, Former CMD, Indian Bank; Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commision*. E-journal on-line <http://ac.els-cdn.com>

Theodorus M. Tuanakota. *Teori Akuntansi*. 2000. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Yusuf CK. Arianto. 2011. *Rahasia Dapat Modal & Fasilitas Dengan Cepat & Tepat*. Jakarta: Gramedia.